



LKPJ-LPPD 2022

KECAMATAN PELAIHARI



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



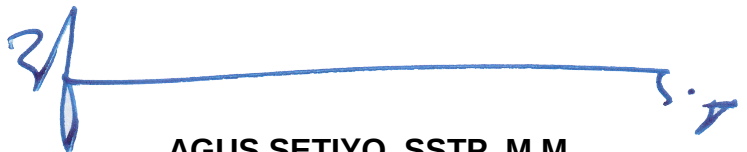
Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ/LPPD dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

LKPJ/LPPD Kecamatan Pelaihari secara garis besar menjabarkan mengenai Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen. Kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Pelaihari, Januari 2023

- CAMAT PELAIHARI,



AGUS SETIYO, SSTP, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19850808 200412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Tanah Laut dibentuk dan ditetapkan sebagai Wilayah Daswati II di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Dalam perkembangannya, Kabupaten Tanah Laut wilayah administrasi kecamatan menjadi 11 kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 5, ruang lingkup Laporan ini meliputi :

- (1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
 - (a) capaian kinerja makro,
 - (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - (c) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
- (2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka LKPJ/LPPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah merupakan ikhtisar/rangkuman dari LKPJ/LPPD SKPD se Kabupaten Tanah Laut termasuk Kecamatan Pelaihari. Oleh karenanya, maka LKPJ/LPPD Kecamatan Pelaihari wajib disampaikan setiap tahunnya untuk memenuhi penyusunan LKPJ/LPPD Kepala Daerah.

1.1.2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Dilingkungan Kecamatan Pelaihari hanya sebagai pengelola administrasi pelaksanaan untuk dana-dana transfer dari Pusat, yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Sehingga mengenai pengelolaan pendapatan daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut hanya mengelola administrasinya saja terhadap dana-dana transfer dari Pusat serta mengelola administrasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 Tahun.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
3. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah), Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dikelola oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Hasil Pajak Daerah;
 - (2) Hasil Retribusi Daerah;
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
 - (2) Dana Alokasi Umum;
 - (3) Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - (2) Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- (4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
- (5) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

- 1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- 2. Melaksanakan validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- 3. Memperkuat kemampuan analisis terhadap kondisi mikro daerah, makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi- asumsi perhitungan pendapatan daerah.

1.1.2.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30 dan Pasal 31 terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;

- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

1.1.2.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2022 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaannya, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggarnya, sudah tentu akan semakin bertambah salahnya pada waktu pelaksanaan belanjanya, sehingga akan menyulitkan

pada waktu penatausahaannya dan akan diragukan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan :

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap prioritas pembangunan nasional
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi , dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program

prioritas nasional, program prioritas provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 serta mempedomani peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2022 telah ditetapkan. Atas dasar RKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengarahkan kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2022 pada prioritas pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan daya saing ekonomi dan perlindungan sosial.
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan beberapa variable, tidak saja menyangkut keperluan yang sangat prioritas, mendesak atau urgent, namun juga memuat hal –hal yang terkait dengan penyesuaian- penyesuaian atas rencana belanja, agar program dan kegiatan yang direncanakan pada belanja langsung dan non program melalui belanja tidak langsung, dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

2022 Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut.

1) Belanja operasi terdiri dari tujuh jenis belanja yaitu:

- (1) belanja pegawai;
- (2) belanja barang dan jasa;
- (3) belanja bunga;
- (4) belanja subsidi;
- (5) belanja hibah;
- (6) belanja bantuan sosial;

2) Belanja Modal terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- (1) belanja tanah;
- (2) belanja peralatan dan mesin;
- (3) belanja bangunan dan gedung;
- (4) belanja jalan;
- (5) belanja irigasi dan jaringan;
- (6) belanja modal aset tetap lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga;

4) Belanja Transfer terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- (1) belanja bagi hasil;
- (2) belanja bantuan keuangan;

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual,

Sinergi). Kemudian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanah Laut 2018-2023 yaitu :

- BERKARYA : Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- INOVASI : Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA : Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
- RELIGIUS : Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL DAN SINERGI : Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Adapun yang menjadi strategi dan arah kebijakan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu :.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan

7. Peningkatan Partsipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.2.2. Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut terpilih menyusun 7 (tujuh) program unggulan yang akan di implentasikan kepada seluruh rakyat Tanah Laut sebagai berikut :

1. Kredit Tanpa Anggunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM, dan lain-lain sebesar 100 Milyar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memilih 7 program unggulan salah satunya adalah pada program kredit tanpa angunan dan bunga 0% untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM dan lain lain sebesar Rp 100 Milyar.

Terkait hal ini sebagai upaya salah satu di MISI ke-5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah dengan target 100 Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%. Mengingat arti penting program unggulan ini, maka langkah yang sudah ditempuh adanya naskah akademik yang menjadi Landasan bagi perumusan Peraturan Bupati Tanah Laut yang mengatur pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% sebesar Rp 100 Milyar. Dalam rangka mencapai hal ini Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut melakukan kajian akademis, baik melalui suatu kajian atau referensi akademis. Tujuan penyusunan naskah akademis ini adalah memberikan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipergunakan sebagai basis perumusan dan implementasi program pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%. Naskah Akademik adalah berupa Kajian Analisis atas Kebijakan Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% sebesar Rp 100 Milyar oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50 %

Untuk membangkitkan dan juga mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Ini merupakan wujud dari pemberdayaan dengan memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial seperti nilai kegotong royongan yang akhir-akhir ini sudah mulai terkikis. Salah satunya adalah dengan peningkatan alokasi dana pembangunan desa. Pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Program unggulan ini salah satu upaya untuk memenuhi MISI 5: Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pembinaan desa. Adapun cakupan kinerja pengelolaan ADD untuk Desa Membangun pada Tahun 2019 dengan target 100 %.

3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di setiap kecamatan dialokasikan 1 Milyar

Kegiatan sosial keagamaan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi orientasi sekaligus. Dimensi dimaksud adalah dimensi *habbluminallah* dan dimensi sosial (*habbluminannas*). Dimensi sosial ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial kita kepada sesama, kondisi sosial suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Perekonomian masyarakat yang lebih merata cenderung akan menciptakan suasana sosial yang lebih adem, nyaman, bahagia, kekeluargaan, rasa persaudaraan dan tentunya senang saling berbagi. Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan *even* sosial keagamaan dengan harapan dapat diperoleh efek positif lain yang mengikutinya.

Kegiatan ini untuk sebagai salah satu upaya menyelesaikan MISI 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya aksi sosial keagamaan. Cakupan kinerjanya program aksi keagamaan dan sosial lingkup Kecamatan dengan target 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dialokasikannya anggaran kegiatan keagamaan dan sosial di masing-masing kecamatan. Alokasi anggaran dimaksud dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD berupa belanja hibah berupa uang yang diusulkan melalui masing-masing Kecamatan dan SKPD terkait. Alokasi anggaran

dimaksud telah tertuang dalam kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.

4. Pelatihan Tenaga Kerja “siap kerja” minimal 500 orang
Pertahun

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, tenaga kerja dari luar saingan dan ancaman yang di anggap cukup penting oleh tenaga-tenaga kerja lokal. Akan tetapi, di sisi lain, tenaga kerja lokal saat ini masih bisa dibilang kalah saing dengan tenaga kerja dari luar. Sebabnya banyak, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang kurang, tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup, dan belum meratanya pembangunan. Semua itulah yang menjadi faktor hambatan kualitas tenaga kerja. Fenomena tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil inisiatif dan kreatif

Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menyelesaikan MISI 1: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sasarannya meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan target jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja sejumlah 500 jiwa.

5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter/Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis

Sebuah inovasi untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi langsung orang yang sakit di rumah. Melalui program ini, dokter/paramedis akan diterjunkan ke masyarakat untuk merawat orang yang sakit.

Hal ini untuk mendukung MISI 1: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sasarannya meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui cakupan kinerja pelayanan kesehatan *On Call*.

Sampai saat ini masih dalam taraf persiapan perangkat-perangkat infrastrukturnya sebelum semuanya diterapkan secara menyeluruh. Kondisi ini diawali dengan pembuatan Perbup No.73 Tahun 2018, tentang pembentukan Publik Safety center 119 Tanah Laut (PSC 119 Tala) yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan pada kasus Gawat Darurat dengan Kriteria;

- Umum
Pasca Stroke, penyakit degenerative, luka diabetikum, luka pasca bedah, dan penyakit lainnya yang memenuhi unsur kegawatan tertentu;
 - Khusus
Kasus kecelakaan, cedera kepala, nyeri hebat, syok dan kasus lainnya yang memenuhi unsur kegawatan tertentu
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan *On Call* dianggarkan pada APBD P Tahun 2019, antara lain seperti persiapan gedung sekretariat, pengadaan ambulan, alat komunikasi, dan alkes.

Pemenuhan SDM berupa tenaga dokter dan perawat yang mempunyai sertifikat *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS). BTCLS adalah tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi. Hal tersebut dapat juga mahir dalam penanggulangan kasus kegawatdaruratan.

6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85 % Jalan Kabupaten

a. Peningkatan/Pengaspalan

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Dalam mendukung MISI 5: Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat., Tujuannya terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas.

b. Layanan Pengaduan Masyarakat

Jalan rusak dan berlubang bisa saja terjadi di seluruh Kabupaten Tanah Laut terutama jalan Kabupaten. Jalan yang rusak dan berlubang itu dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan pengendara jalan terjatuh akibat lubang. Warga dapat berpartisipasi dalam melaporkan kondisi dan lokasi jalan mana saja yang perlu perbaikan, sehingga kecelakaan pun dapat dihindarkan.

7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa/Kelurahan Selama Masa Jabatan

Menginap bersama masyarakat dilakukan sejak Tanggal 4 Oktober 2018 sampai berakhir masa jabatan, dengan lokasi menginap pertama kali setelah dilaksanakan pelantikan di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi ke-5 yaitu Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tujuan ke-5, yaitu upaya membina desa dan menata kota.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari kalangan paling bawah bersama seluruh kepala dinas dan pejabat lain dan upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau curhat atau aspirasinya tidak terlalu berat, langsung dapat selesai dalam pertemuan, tetapi kalau persoalannya berat dan butuh pembahasan serta pertimbangan banyak pihak, maka ditampung dulu untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan bersama dinas dan instansi terkait. Selain itu juga diberikan layanan-layanan kepada masyarakat dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat maupun aparat desa.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Gerografis Daerah

Kecamatan Pelaihari adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada 114,642⁰–114,872⁰ Bujur Timur dan 3,64062⁰–3,99204⁰ Lintang Selatan dengan batas–batas wilayah sebelah utara Kecamatan Tambang Ulang, sebelah timur Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar, sebelah barat Kecamatan Takisung dan sebelah selatan Kecamatan Panyipatan. Tinggi dari permukaan laut 25 meter dan memiliki luas wilayah 378,95 Km² dengan jumlah Kelurahan dan Desa adalah 5 Kelurahan dan 15 Desa.

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa di Kecamatan Pelaihari

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN (%)
1	Sungai Riam	42,33	11,17
2	Kampung Baru	32,77	8,65
3	Sumber Mulia	10,5	2,77
4	Tampang	11,5	3,04
5	Sarang Halang	11	2,9
6	Bumi Jaya	8	2,11
7	Atu-Atu	3	0,79
8	Angsau	10,5	2,77
9	Pelaihari	15	3,96
10	Karang Taruna	22	5,81
11	Telaga	23	6,07
12	Guntung Besar	6	1,58
13	Panjaratan	16	4,22
14	Tungkaran	27,75	7,32
15	Panggung	39	10,29
16	Pabahanan	2,8	0,74
17	Ambungan	13,5	3,56
18	Panggung Baru	19	5,02
19	Ujung Batu	21	5,54
20	Pemuda	44,3	11,69
Total Luas Daerah		378,95	100,00

Sumber : Pelaihari dalam Angka 2021, BPS Tanah Laut

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Pelaihari menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 sebanyak jiwa. Dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.2. Jumlah Pendudukan menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan/Desa Semester I Tahun 2022 di Kecamatan Pelaihari

NO	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sungai Riam	1.851	1.784	3.635
2	Kampung Baru	744	720	1.454
3	Sumber Mulia	891	839	1.730
4	Tampang	593	583	1.176
5	Sarang Halang	3.403	3.433	6.836
6	Bumi Jaya	1.311	1.261	2.572
7	Atu-Atu	1.698	1.676	3.374
8	Angsau	6.492	6.465	12.957
9	Pelaihari	5.591	5.569	11.160
10	Karang Taruna	5.315	5.257	10.572
11	Telaga	1.401	1.393	2.794
12	Guntung Besar	320	315	635
13	Panjaratan	537	498	1.035
14	Tungkaran	409	388	797
15	Panggung	2.912	2.858	5.770
16	Pabahanan	1.424	1.431	2.855
17	Ambungan	1.117	1.005	2.122
18	Panggung Baru	897	843	1.740
19	Ujung Batu	1.515	1.502	3.017
20	Pemuda	1.329	1.223	2.552
JUMLAH		39.750	39.043	78.793

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Semester I Tahun 2022

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tanah Laut periode 2010-2020 mencapai 1,85 %. Berdasarkan tren yang ada, apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kabupaten Tanah

Laut termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% bahkan kurang dari 1%.

Tabel. 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase
Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Desa di Kecamatan Pelaihari, 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN 2010-2020
1	2	3	4
1	Sungai Riam	3.635	1,52
2	Kampung Baru	1.464	1,63
3	Sumber Mulia	1.730	1,83
4	Tampang	1.176	1,63
5	Sarang Halang	6.836	2,64
6	Bumi Jaya	2.572	1,60
7	Atu-Atu	3.374	2,26
8	Angsau	12.957	0,90
9	Pelaihari	11.160	0,69
10	Karang Taruna	10.572	3,73
11	Telaga	2.794	2,40
12	Guntung Besar	635	4,13
13	Panjaratan	1.035	1,06
14	Tungkaran	797	1,47
15	Panggung	5.770	2,15
16	Pabahanan	2.855	2,35
17	Ambungan	2.122	1,70
18	Panggung Baru	1.740	2,26
19	Ujung Batu	3.017	1,25
20	Pemuda	2.552	3,01
JUMLAH		78.793	1,85

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2022

Tabel. 1.4
Distribusi Persentase Penduduk, 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (per km ²) ⁴
1	2	3	4
1	Sungai Riam	4,61	85
2	Kampung Baru	1,85	44
3	Sumber Mulia	2,23	165
4	Tampang	1,49	101
5	Sarang Halang	8,69	616
6	Bumi Jaya	3,26	318
7	Atu-Atu	4,29	1114
8	Angsau	16,60	1233
9	Pelaihari	14,28	743
10	Karang Taruna	13,14	466
11	Telaga	3,50	119
12	Guntung Besar	0,79	102
13	Panjaratan	1,32	65
14	Tungkaran	1,04	29
15	Panggung	7,27	145
16	Pabahanan	3,67	1024
17	Ambungan	2,74	159
18	Panggung Baru	2,16	89
19	Ujung Batu	3,83	142
20	Pemuda	3,24	57
JUMLAH		100,00	206

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2022

Tabel. 1.5
Rasio Jenis Kelamin, 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PERSENTASE PENDUDUK
1	2	3
1	Sungai Riam	103
2	Kampung Baru	105
3	Sumber Mulia	105
4	Tampang	101
5	Sarang Halang	99
6	Bumi Jaya	103
7	Atu-Atu	100
8	Angsau	100
9	Pelaihari	101
10	Karang Taruna	102
11	Telaga	101
12	Guntung Besar	102
13	Panjaratan	111
14	Tungkaran	106
15	Panggung	102
16	Pabahanan	100
17	Ambungan	112
18	Panggung Baru	106
19	Ujung Batu	102
20	Pemuda	108
JUMLAH		102

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2022

1.3.4. Jumlah PNS

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

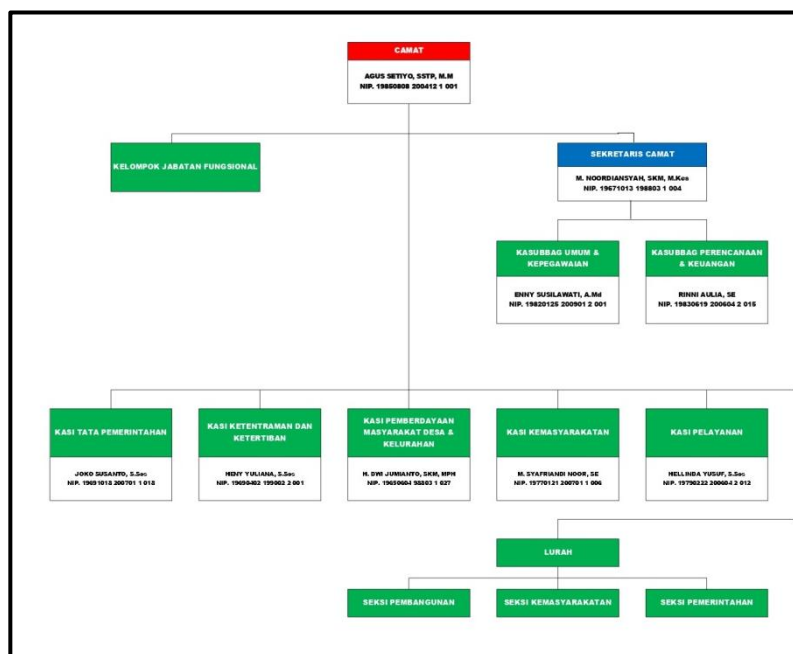
- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Pelayanan

Adapun struktur organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kasi Pembangunan
- d. Kasi Kemasyarakatan
- e. Kasi Pemerintahan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PELAIHARI



Sumber daya manusia di Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berjumlah 18 orang Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah PNS Kecamatan Pelaihari dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Pelaihari pada 2022 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.6. Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2022

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	...
2	Pembina	IV/a	3
2	Penata Tingkat I	III/d	5
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
75	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tingkat I	II/d	-
7	Pengatur	II/c	2
Jumlah			18

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2022

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.7 PNS Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	2
2.	S1	9
3.	D3	4
4.	SMA	3
Jumlah		18

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2022

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 1.8 Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2022

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		9

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2022

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 1.9 Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	..
2.	DIKLAT PIM TK.IV	..
Jumlah		..

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2022

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Aset atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan di Kecamatan Pelaihari terdiri dari:



1. Tanah

Tabel 1.10 Daftar Tanah Kecamatan Pelaihari

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Kantor Kec. Pelaihari	1	2.215.400.000	
Jumlah		1	2.215.400.000	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

2. Gedung dan Bangunan1

Tabel 1.11 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Pelaihari

No	Bangunan dan Gedung	Jumlah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Kantor Kecamatan	1	5.434.796.818,00	Baik
2	Gedung Pos Jaga	1	97.954.000,00	Baik
3	Tempat Parkir	1	27.300.000,00	Baik
4	Menara Tower Air	1	7.135.000,00	Baik
5	Bangunan Parkir Terbuka	1	281.393.000,00	Baik
6	Rumah Dinas	1	155.536.000,00	Baik
7	Pagar	1	249.069.000,00	Baik
8	Halaman Kantor	1	219.440.000,00	Baik
Jumlah		8	6.472.623.818,00	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

Penambahan nilai aset bangunan dan gedung terjadi penganggaran belanja Pembangunan Pagar, Pos Jaga, Tempat Parkir, Tambahan Paving Blok Halaman Kantor Kecamatan Pelaihari dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Tanah Laut, sedangkan rehabilitasi Rumah Dinas Camat dianggarkan DPA-SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2019.

3. Peralatan dan Mesin

a. Transportasi roda 4 dalam rangka operasional Camat

Mobil operasional digunakan untuk keperluan dinas Camat dalam perencanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan. Namun demikian, jumlah ini dirasakan masih kurang, sehingga sering terjadi penundaan kegiatan khususnya kegiatan dalam hal monitoring ke Desa/Kelurahan karena menunggu kendaraan yang dipakai secara bergantian.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan kerja aparatur Kecamatan Pelaihari telah pula tersedia peralatan kerja. Peralatan hasil inventarisasi BMD tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 1.12 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Pelaihari

NO	PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH BARANG	HARGA	KONDISI
1	Pompa air	2	4.900.000,00	B
2	Mini bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2	371.797.142,86	B
3	Sepeda Motor	5	101.996.382,00	B
4	Mesin potong rumput	1	1.650.000,00	KB
5	Lemari besi	10	26.438.020,00	B
6	Rak Besi	3	5.220.224,00	B
7	Filling Cabinet	9	18.361.244,00	RB 1
8	Lemari Makan	1	2.000.000,00	RB
9	Lemari Kayu	4	5.500.000,00	RB 1
10	Alat Penghancur kertas	1	2.500.000,00	RB
11	Rak Besi	3	5.220.224,00	B
12	Rak Kayu	2	3.300.000,00	B
13	Termometer Standar	1	950.000,00	RB
14	Papan Pengumuman	1	1.000.000,00	B
15	Meja Kerja Kayu	30	28.960.000,00	RB 2
16	Meja Rapat	20	15.779.092,00	B
17	Kursi Rapat	67	16.750.000,00	RB 10
18	Meja Panjang	1	100.000,00	KB
19	Kursi Tamu	3	10.500.000,00	B
20	Kursi Biasa	19	27.547.954,00	RB 3
21	Bangku Tunggu	4	8.490.000,00	B
22	Sofa	5	31.759.032,00	RB 1
23	Lemari Es	2	7.500.000,00	B
24	CCTV	2	13.200.000,00	B
25	Papan Visual	1	6.900.000,00	B
26	AC Split	15	79.952.869,00	RB 3
27	Kipas Angin	8	4.150.000,00	RB 2
28	Televisi	2	9.000.000,00	RB 1
29	Loudspeaker	2	16.624.000,00	B
30	Sound sistem	2	9.250.000,00	B
31	Stabilisator	1	2.350.000,00	B
32	Camera Video	1	4.750.000,00	B
33	Handy cam	1	2.700.000,00	B
34	Karpet	4	2.700.000,00	B
35	Tangga	1	3.325.000,00	B
36	Audio Mixing Stationer	1	4.987.000,00	B
37	Audio Monitor Active	1	9.279.000,00	B
38	Audi1o Visual	1	1.288.000,00	B
39	Microphone/Wireless Mic	1	2.319.000,00	KB
40	Power Amplifier	3	15.720.000,00	B
41	Camera Elektronik	1	2.600.000,00	RB
42	Projektor	3	33.850.000,00	B

NO	PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH BARANG	HARGA	KONDISI
43	GPS	2	13.950.000,00	B
44	Genset	1	15.755.000,00	B
45	UPS	4	4.778.225,00	RB 3
46	PC Unit	7	62.187.000,00	RB 1
47	Lap top	11	88.430.000,00	RB 2
48	Printer	15	33.368.850,00	RB 2
49	Scanner	1	750.000,00	B
		245	1.142.383.258,86	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di laksanakan oleh Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.13 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Pelaihari

NO	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp. 19.233.500,-	Rp. -	0
JUMLAH		Rp. 19.233.500,-	Rp. -	0

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Anggaran belanja Kecamatan Pelaihari pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 16.002.698.476,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.957.604.667,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 87,22% yang perinciannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.14
Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	14.237.753.877	14.533.344.898	12.620.658.008	88,84
2.	Belanja Modal	1.628.880.310	1.469.353.578	1.336.946.659	90,99
JUMLAH TOTAL		15.866.634.187	16.002.698.476	13.957.604.667	87,22

Sumber : LRA APBD 2022 Kecamatan Pelaihari

Jika dilihat dari komposisinya Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 90,42% dari total belanja Kecamatan Pelaihari dan sisanya sebesar 9,58 % dari Belanja Modal.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat 2 bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Tahapan penyusunan APBD Perubahan 2022 Kecamatan Pelaihari telah melakukan penyusunan Rencana Kerja APBD Perubahan 2022 berdasarkan skala prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Tanah Laut, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2022 Kecamatan Pelaihari yaitu dengan melakukan penambahan anggaran untuk mengakomodir kegiatan yang masih belum terfasilitasi pada APBD murni tahun anggaran 2022.

Untuk tabel Rekap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD Tahun Anggaran pada Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekap APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)
6 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp19.233.250	Rp19.233.250	-
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp19.233.250	Rp19.233.250	-
	Jumlah Pendapatan	Rp19.233.250	Rp19.233.250	-

5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI	Rp14.237.753.877	Rp14.533.344.898	Rp. 295.591.021
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.969.932.257	Rp10.129.932.257 Rp. 160.000.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.715.566.620	Rp3.851.157.641 Rp. 135.591.021
5	1	05	Belanja Hibah	Rp552.255.000	Rp552.255.000 -
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.628.880.310	Rp1.469.353.578 Rp. (159.526.732)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp123.924.518	Rp151.715.021 Rp. 27.790.503
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp333.671.296	Rp433.679.622 Rp. 100.008.326
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp1.171.284.496	Rp883.958.935 Rp. (287.325.561)
		Jumlah Belanja	Rp15.866.634.187	Rp16.002.698.476	Rp. 136.064.289

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang telah di amanahkan sebagai pelaksanaan kinerja kepada pada pejabat pengawas dan pelaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kepada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai fungsi Kewilayahan dan urusan, kami paparkan capaian anggaran pelaksanaan program tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja 2022 Kecamatan Pelaihari sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 11.603.760.073,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.169.162.003,- atau 87,64%.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 3.623.079.825,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.217.694.733,- atau 88,81%.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 703.402.821,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 575.937.933,- atau 81,88%
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 9.913.544,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2022 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan

menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2022 pagu anggaran murni sebesar Rp 15.866.634.187,-, dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 16.002.698.476,-. Penambahan pagu anggaran sebesar Rp 136.064.289,- pada APBD Perubahan dikarenakan adanya kebutuhan belanja yang belum terakomodir pada APBD Murni serta adanya penyesuaian-penyesuaian belanja. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp 13.957.604.667,- atau sebesar 87,22%. Untuk lebih jelas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 s.d lampiran 6.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Kecamatan Pelaihari untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas kepada masyarakat dalam pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

A. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2022 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

a) Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur, namun terkadang masih ada kendala pada organisasi kemasyarakatan maupun SKPD terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
 - 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
 - 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
 - 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
 - 5) Penggunaan dan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
 - 6) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- b) Penatausahaan Keuangan dan Aset
- 1) Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
 - 2) Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
 - 3) Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD.
 - 4) Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
 - 5) Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
 - 6) Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.

- 7) Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- 8) Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

Solusi yang akan di laksanakan :

a) Hibah dan Bantuan Sosial

1. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
2. Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial

b) Penatausahaan Keuangan dan Aset

- 1) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
- 3) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

- 4) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 5) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 6) Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 7) Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan yang tercantum pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.2. Kebijakan Strategis yang Di tetapkan

Dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan Tahun 2022 berikut beberapa kebijakan strategis yang di ambil oleh Kecamatan Pelaihari :

Tabel 3.1
Kebijakan Startegis terhadap Permasalahan yang
ada di Kecamatan Pelaihari

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pedoman Pemerintahan Kelurahan	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kelurahan	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan di Kelurahan
2.	Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Pelaihari	Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Tanah Laut	Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dapat dilakukan seara efektif dan efesien

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.2
Rekomendasi DPRD Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan kegiatan Hibah 1 Milyar per Kecamatan	Setelah kondisi Kecamatan Pelaihari yang telah menurun pada bulan Juli 2021 menjadi PPKM level 2 maka pelaksanaan kegiatan di lanjutkan bergantian oleh organisasi kemasyarakatan penerima hibah	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

SKPD Kecamatan Pelaihari yang merupakan unsur kewilayahan tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari total pagu anggaran Rp 16.002.698.476,- terealisasi sebesar Rp. 13.957.604.667,- atau sebesar 87,22%, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 target sebesar Rp. 19.233.500,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

2. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kecamatan Pelaihari yaitu menjadi Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bati-Bati.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Fisik dan Anggaran Kecamatan Pelaihari TA. 2022

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2022

TRIWULAN IV

KECAMATAN PELAIHARI

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.376.407.536,00	10.564.235.854,00		9.219.245.145,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.969.932.257,00	10.129.932.257,00		8.812.466.425,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.969.932.257,00	10.129.932.257,00	100,00%	8.812.466.425,00	86,99%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.874.220,00	122.844.930,00		112.113.204,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.545.473,00	7.545.473,00	98,00%	6.773.000,00	89,76%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.151.763,00	35.122.473,00	97,00%	28.337.500,00	80,68%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.176.984,00	10.176.984,00	95,00%	7.058.200,00	69,35%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	69.944.504,00	99,92%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.801.059,00	239.674.467,00		227.372.807,00	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.757.859,00	41.757.080,00	100,00%	30.426.439,00	72,87%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.043.200,00	197.917.387,00	100,00%	196.946.368,00	99,51%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.800.000,00	71.784.200,00		67.292.709,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	98,00%	58.749.109,00	97,92%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000,00	11.784.200,00	98,00%	8.543.600,00	72,50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	12.975.377,00		12.043.866,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	12.975.377,00		12.043.866,00	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	12.975.377,00	100,00%	12.043.866,00	92,82%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	703.402.821,00	703.402.821,00		575.937.933,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	703.402.821,00	703.402.821,00		575.937.933,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	703.402.821,00	703.402.821,00	100,00%	575.937.933,00	81,88%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.913.544,00	9.913.544,00		0,00	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544,00	9.913.544,00		0,00	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.913.544,00	9.913.544,00	50,00%	0,00	0,00%
JUMLAH		11.089.723.901	11.277.552.219		9.795.183.078	86,86%

Lampiran 2. Realisasi Fisik dan Anggaran Kelurahan Angsau TA. 2022

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KELURAHAN ANGS AU**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	235.719.210,00	235.719.210,00		194.848.183,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00		2.170.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	74,80%	2.170.000,00	74,83%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	55,60%	1.000.000,00	55,56%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.396.549,00	54.396.549,00		40.080.567,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.820.206,00	1.820.206,00	56,90%	1.035.000,00	56,86%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.539.448,00	18.539.448,00	80,70%	14.963.800,00	80,71%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.556.895,00	5.556.895,00	57,10%	3.175.000,00	57,14%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	69,70%	17.426.767,00	69,71%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.125.328,00	4.125.328,00		2.488.500,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.125.328,00	4.125.328,00	60,30%	2.488.500,00	60,32%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.987.656,00	136.987.656,00		123.437.066,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.999.086,00	12.999.086,00	60,00%	6.815.466,00	52,43%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.988.570,00	123.988.570,00	94,00%	116.621.600,00	94,06%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.509.677,00	35.509.677,00		25.672.050,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.559.677,00	27.559.677,00	79,90%	22.042.050,00	79,98%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000,00	7.950.000,00	45,60%	3.630.000,00	45,66%

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	827.602.268,00	863.602.268,00		794.707.700,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.602.268,00	863.602.268,00		794.707.700,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	43,00%	2.150.000,00	43,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	436.894.653,00	436.894.653,00	90,00%	395.324.000,00	90,48%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.160.147,00	200.160.147,00	99,30%	178.976.500,00	89,42%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	185.547.468,00	221.547.468,00	98,50%	218.257.200,00	98,51%
		1.063.321.478	1.099.321.478		989.555.883	90,02%

Lampiran 3. Realisasi Fisik dan Anggaran Kelurahan Karang Taruna TA. 2022

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KELURAHAN KARANG TARUNA**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.026.025,00	217.727.125,00		175.325.808,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.806.000,00	2.806.000,00		2.000.000,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.806.000,00	2.806.000,00	71,00%	2.000.000,00	71,28%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.094.614,00	74.194.614,00		55.272.944,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.362.137,00	1.362.137,00	76,00%	1.033.000,00	75,84%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.167.623,00	17.167.623,00	70,00%	10.217.000,00	59,51%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.184.854,00	4.184.854,00	80,00%	957.800,00	22,89%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	30,00%	960.000,00	27,59%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.900.000,00	48.000.000,00	88,00%	42.105.144,00	87,72%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.035.330,00	27.035.330,00		23.750.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.035.330,00	27.035.330,00	88,00%	23.750.000,00	87,85%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.140.081,00	94.741.181,00		84.065.564,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.998.881,00	21.599.981,00	71,00%	15.296.206,00	70,82%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.141.200,00	73.141.200,00	94,00%	68.769.358,00	94,02%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.950.000,00	18.950.000,00		10.237.300,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.000.000,00	11.000.000,00	48,00%	5.297.300,00	48,16%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000,00	7.950.000,00	62,00%	4.940.000,00	62,14%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	766.746.668,00	607.062.835,00		530.181.441,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	766.746.668,00	607.062.835,00		530.181.441,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.997.986,00	4.997.986,00	98,00%	4.885.000,00	97,74%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	486.965.776,00	315.281.943,00	90,00%	283.991.441,00	90,08%

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.783.038,00	149.783.038,00	75,00%	104.745.000,00	69,93%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	124.999.868,00	136.999.868,00	99,00%	136.560.000,00	99,68%
		954.772.693	824.789.960	0	705.507.249	85,54%

Lampiran 4. Realisasi Fisik dan Anggaran Kelurahan Pabahanan TA. 2022

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KELURAHAN PABAHAHAN**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	197.280.969,00	197.280.969,00		182.244.222,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.276.520,00	5.276.520,00		5.052.700,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.276.520,00	5.276.520,00	96,00%	5.052.700,00	95,76%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00		15.000.000,00	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	92,00%	15.000.000,00	75,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.196.855,00	33.196.855,00		32.826.850,00	

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.566.143,00	1.566.143,00	100,00%	1.540.000,00	98,33%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.630.712,00	6.630.712,00	94,00%	6.296.350,00	94,96%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	24.990.500,00	99,96%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.635.221,00	39.635.221,00		39.430.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.635.221,00	39.635.221,00	100,00%	39.430.000,00	99,48%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.572.373,00	80.572.373,00		71.677.014,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.341.539,00	13.341.539,00	69,00%	9.156.774,00	68,63%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.230.834,00	67.230.834,00	93,00%	62.520.240,00	92,99%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00		15.557.658,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%	8.487.658,00	99,85%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	97,00%	7.070.000,00	95,54%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	726.529.519,00	738.729.519,00		631.933.908,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.999.713,00	4.999.713,00		0,00	

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.999.713,00	4.999.713,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	721.529.806,00	733.729.806,00		631.933.908,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	357.437.344,00	357.437.344,00	100,00%	337.660.908,00	94,47%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278.161.397,00	278.161.397,00	72,00%	198.433.000,00	71,34%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	85.931.065,00	98.131.065,00	98,00%	95.840.000,00	97,67%
		923.810.488	936.010.488		814.178.130	86,98%

Lampiran 5. Realisasi Fisik dan Anggaran Kelurahan Pelaihari TA. 2022

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KELURAHAN PELAIHARI**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.133.772,00	239.849.958,00		214.017.245,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.420,00	1.990.420,00		1.949.890,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.990.420,00	1.990.420,00	100,00%	1.949.890,00	97,96%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00		1.200.000,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	80,00%	1.200.000,00	66,67%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.522.150,00	59.914.171,00		50.881.729,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.228.208,00	1.228.208,00	100,00%	1.223.000,00	99,58%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.775.540,00	28.217.561,00	100,00%	25.020.300,00	88,67%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.518.402,00	6.518.402,00	97,00%	5.686.000,00	87,23%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	23.950.000,00	95,00%	18.952.429,00	79,13%

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.873.365,00	24.997.165,00		22.940.000,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.873.365,00	24.997.165,00	100,00%	22.940.000,00	91,77%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.592.933,00	133.793.298,00		126.407.526,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.999.848,00	12.200.213,00	100,00%	10.628.926,00	87,12%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.271.485,00	1.271.485,00	100,00%	1.163.000,00	91,47%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.321.600,00	120.321.600,00	99,00%	114.615.600,00	95,26%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.354.904,00	17.354.904,00		10.638.100,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.004.904,00	14.004.904,00	95,00%	8.168.100,00	58,32%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00%	2.470.000,00	73,73%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	683.555.044,00	671.434.288,00		620.080.978,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	683.555.044,00	671.434.288,00		620.080.978,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.999.985,00	4.999.985,00	100,00%	4.845.000,00	96,90%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	211.509.419,00	211.212.160,00	100,00%	201.776.812,00	95,53%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	313.446.013,00	272.022.516,00	100,00%	230.605.266,00	84,77%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	153.599.627,00	183.199.627,00	100,00%	182.853.900,00	99,81%
		911.688.816	911.284.246		834.098.223	91,53%

Lampiran 6. Realisasi Fisik dan Anggaran Kelurahan Sarang Halang TA. 2022

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KELURAHAN SARANG HALANG**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan	
					Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.393.786,00	211.489.170,00		183.481.400,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.048,00	1.484.048,00		800.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.484.048,00	1.484.048,00	53,91%	800.000,00	53,91%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.270.829,00	83.270.829,00		72.995.200,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.064.780,00	5.064.780,00	100,00%	4.835.000,00	95,46%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.139.430,00	23.139.430,00	75,00%	16.938.000,00	73,20%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.596.619,00	5.596.619,00	60,39%	3.380.000,00	60,39%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00%	2.850.000,00	81,90%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.990.000,00	45.990.000,00	100,00%	44.992.200,00	97,83%

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.360.799,00	13.360.799,00		13.275.000,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.360.799,00	13.360.799,00	100,00%	13.275.000,00	99,36%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.426.846,00	90.522.230,00		79.985.600,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.435.024,00	16.530.408,00	80,00%	12.669.660,00	76,64%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.991.822,00	73.991.822,00	90,00%	67.315.940,00	90,98%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.851.264,00	22.851.264,00		16.425.600,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.151.264,00	16.151.264,00	60,00%	11.160.600,00	69,10%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000,00	6.700.000,00	80,00%	5.265.000,00	78,58%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	734.923.025,00	729.275.538,00		628.746.840,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	734.923.025,00	729.275.538,00		628.746.840,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.997.986,00	4.997.986,00	100,00%	4.990.000,00	99,84%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.997.493,00	199.724.344,00	100,00%	174.791.000,00	87,52%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	436.928.954,00	413.954.616,00	80,00%	343.197.340,00	82,91%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	92.998.592,00	110.598.592,00	100,00%	105.768.500,00	95,63%
		923.316.811	940.764.708	0	812.228.240	86,34%